

ANALISIS BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN DAN PERSONAL SISWA DI KOTA BANDUNG

Nanang Fattah* dan Abubakar

Jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kondisi sarana dan prasarana pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bandung; (2) besaran biaya investasi berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bandung; (3) besaran biaya personal siswa dalam mengikuti pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bandung. Penelitian survei ini melibatkan berbagai jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bandung. Sampel penelitian meliputi 12 sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Analisis data menggunakan program *excel* untuk menemukan biaya satuan berdasarkan hasil perhitungan yang dikalikan dengan IKK Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua menanggung lebih dari 50% biaya pendidikan. Biaya yang dikeluarkan orang tua sebesar 70,87 % untuk SD, 59,24% untuk SMP, 66,77% untuk SMA dan 58,22% SMK Nonteknik serta 56,30% untuk SMK Teknik. Oleh karena itu, beban orang tua dalam membiayai anaknya lebih besar dan menentukan keberhasilan penyelesaian pendidikan anaknya.

Kata kunci: biaya, pemerintah, masyarakat, investasi

Abstract: *This research aims to describe: (1) condition of educational facilities viewed from type and level of education in Bandung, (2) the amount of investment costs based on the type and level of education in Bandung, and (3) the amount of personal expenses for students to participate in education viewed from type and level of education Bandung. This study used a survey method which covers the various types and levels of education Bandung. The research sample includes 12 schools. The data were collected by interview. The data were analyzed by using excel program to find out the cost unit based on the results of the calculation that are multiplied by IKK the city of Bandung. The results of the study showed that parents bear more than 50% of the education cost. Costs spent by parents reached 78.87% for elementary school, 59.24% for junior high school and 66.77% for senior high school, up to 58.22% for non-technical vocational school, and 56.30% for technical vocational school. Therefore, the expense paid by parents for their children. Finance is too much and it determines the success of finishing or completing their education.*

Keywords: *cost, government, society, investment*

*Alamat korespondensi: Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia yang memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern. Biaya pendidikan merupakan salah satu sumber daya penting bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sumber biaya tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat dan daerah, dari swasta, masyarakat, maupun orang tua siswa. Namun, pemerintah sebagai regulator, eksekutor, dan fasilitator menjadi diterminan utama dalam pembiayaan pendidikan nasional.

Konstitusi amandemen UUD 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 46 Ayat (1) bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa tanggung jawab pendanaan pendidikan tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi harus mendapat dukungan dari kalangan swasta dan masyarakat.

Agar dapat menerapkan ketentuan di atas diperlukan adanya standar nasional

bidang pendidikan yang mencakup delapan standar, yaitu: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Untuk melaksanakan standarisasi tersebut telah diterbitkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan pengaturan standar nasional pendidikan sekaligus merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2005 berimplikasi kepada perlunya disusun standar pembiayaan. Standarisasi komponen biaya pendidikan itu meliputi biaya operasional, investasi, dan personal untuk satu tahun anggaran.

Terkait dengan hal tersebut, orang tua memiliki peran yang signifikan dalam pembiayaan anaknya di sekolah. Mereka terlibat dalam biaya langsung bagi pendidikan anaknya. Mereka dituntut untuk berperan aktif baik sebagai pengguna layanan sekolah maupun dalam pemenuhan hak sebagai warga negara terhadap pendidikan dan mereka dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan baik jumlah dan mutu menurut jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bandung?; (2) Berapa besar biaya investasi berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) di Kota Bandung?; dan (3) Berapa besar biaya personal siswa yang dikeluarkan selama setahun dalam mengikuti proses pendidikan menurut jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Bandung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei yang melibatkan pihak sekolah di berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang meliputi: SDN, SMPN, SMAN, SMKN di Kota Bandung menurut kategori kelompok tinggi, sedang, dan rendah dalam penggunaan anggaran sekolah. Setiap sekolah mengisi instrumen penelitian yang mencakup komponen-komponen biaya yang telah disusun oleh tim peneliti berdasarkan projek kebutuhan sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mikro (satuan pendidikan sekolah).

Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen *input* pendidikan di setiap sekolah. Satuan biaya pendidikan meliputi: biaya nonpersonalia dan biaya investasi di tingkat sekolah yang merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah dibagi jumlah siswa per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya siswa sekolah. Pendekatan ini menggunakan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan menghitung seluruh pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah siswa sekolah pada tahun bersangkutan.

Sampel penelitian ini meliputi sekolah yang ada di Kota Bandung. Adapun wilayah sampel penelitian adalah sekolah berdasarkan jenis dan jenjang yang berada di kota Bandung yang berjumlah 12 sekolah dengan jenis dan jenjang sekolah mencakup: SD, SMP, SMA, dan SMK.

Berdasarkan pertimbangan sampel tersebut, maka sekolah-sekolah yang dipandang mewakili kriteria sebagai responden adalah: (1) SDN 5 Merdeka; (2) SDN Cijaura; (3) SDN Cijambe; (4) SMPN 6 Bandung; (5) SMPN 1 Bandung; (6) SMPN 36 Bandung; (7) SMAN 3 Bandung; (8) SMAN 9 Bandung; (9) SMAN 12 Bandung; (10) SMKN 11 Bandung; (11) SMKN 5 Bandung; dan (12) SMKN 7 Bandung.

Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang menggambarkan besaran biaya investasi dan personal siswa di setiap sekolah menurut jenis dan jenjang sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Pimpinan sekolah maupun siswa atau orang tua siswa sebagai sumber data. Adapun langkah-langkah mengisi instrumen penelitian yang ditempuh adalah: (1) Menyusun instrumen sesuai dengan tujuan dan rambu-rambu penelitian; (2) Menguji validitas dan reliabilitas instrumen; (3) Perbaikan instrumen; dan (4) Pengumpulan data.

Data yang terkumpul dari setiap sekolah akan diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dimaksud meliputi: (1) Menghitung biaya nonpersonalia, investasi pendidikan, dan personal siswa berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan menurut proyeksi kebutuhan penyelenggaraan proses pembelajaran di Kota Bandung dan (2) Menghitung biaya satuan personal siswa sekolah berdasarkan seluruh komponen kebutuhan dalam mengikuti proses pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah: (1) Setelah data terkumpul, data dikelompokkan berdasarkan jenis dan kategori wilayah sampel dan asal daerah; (2) Melaku-

kan *entry data* ke dalam program *Excel* komputer berdasarkan jenis data; (3) Setelah itu dilakukan pemrosesan dan penghitungan data dengan menggunakan program *Excel* dan ditemukan angka biaya satuan berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya angkanya dikalikan (diseuaikan) dengan indeks kemahalan konsumen (IKK) Kota Bandung; dan (4) Menafsirkan data dan membuat kesimpulan sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi penentuan model biaya investasi adalah variabilitas sekolah yang dilihat dengan kelengkapan fasilitas pendidikan dan kluster sekolah di Kota Bandung. Biaya personal dilihat dari variabilitas sosial ekonomi orang tua siswa dalam membiayai anaknya di sekolah.

Hasil penelitian yang disajikan ini berupaya menggambarkan kondisi objektif pembiayaan sekolah di Kota Bandung menurut jenis dan jenjang sekolah yang dijadikan sampel penelitian. Biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk biaya investasi mencakup: (1) Lahan; (2) Bangunan; (3) Alat; (4) Mebeler; (5) Buku; (6) Kendaraan; dan (7) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terkait dengan hal tersebut dapat dikemukakan data pendukung berikut ini.

Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan hasil pengolahan data; maka berturut-turut akan dipaparkan mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan sebagai bentuk dari biaya investasi yang dilaksanakan di Kota Bandung. Kondisi luas lahan sekolah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Lahan Sekolah Menurut Jenjang Sekolah

No	Jenjang Sekolah	Rata-rata Luas Lahan	Standar (SNP)
1	SD	2.580 m ²	1340 - 4070 m ²
2	SMP	3.802 m ²	1420 - 5240 m ²
3	SMA	7.717 m ²	2140 - 6040 m ²
4	SMK	11.836 m ²	2140 - 6040 m ²

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata luas lahan yang digunakan untuk sekolah SD dan SMP masih pada kisaran standar nasional. Namun, untuk luas lahan SMA dan SMK sudah lebih baik yakni melebihi standar yang telah ditetapkan. Terkait ukuran ruang kelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Merujuk pada tabel 2, ukuran kelas per rombongan belajar baik di tingkat SD; SMP; SMA dan SMK memiliki tingkat kepadatan yang bervariasi dan pada umumnya tidak memenuhi standar. Misal SD

1;55 kondisi sekarang; sementara SNP-nya 3;1-3;8 M2 per orang. Jumlah satu rombongan sekarang masih berjumlah rata-rata 36 orang tiap jenjang. Sementara menurut SNP SD antara 15-28 orang per rombel; SNP SMP 15-32 orang; dan SNP SMA/SMK 15-32 orang per rombel.

Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah menurut jenjang sekolah dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Untuk jenjang SD belum memiliki ruang wakil kepala sekolah; Lab. IPA; Lab. Bahasa; ruang *workshop*; ruang serbagu-

Tabel 2. Kondisi Ukuran Kelas Menurut Jenjang Sekolah

No	Jenjang Sekolah	Luas Kelas	Kepadatan per Siswa	Standar (SNP)
1	SD	8 x 7= 56 m ²	1,55 m ²	3,1 - 3,8 m ²
2	SMP	7 x 9= 63 m ²	1,75 m ²	3,4 - 6,9 m ²
3	SMA	9 x 8= 72 m ²	2 m ²	3,8 - 10,9 m ²
4	SMK	9 x 8= 72 m ²	2 m ²	3,8 - 10,9 m ²

Catatan: 1 rombel 36 orang, SMP SD 15 - 28 orang, SNP SMP 15 - 32/rombel

Tabel 3. Kelengkapan Sarana Sekolah Menurut Standar (SNP)

No	Ketersediaan Sarana	SD	SMP
1	Ruang Kelas	Baik	Baik
2	Ruang Kepala Sekolah	Baik	Baik
3	Ruang Wakil Kepala Sekolah	Tidak memiliki	Baik
4	Ruang Guru	Baik	Baik
5	Ruang/Gedung Perpustakaan	Baik	Baik
6	Ruang/Gedung Lab Ipa	Tidak memiliki	Baik
7	Ruang/Gedung Lab Komputer	Baik	Baik
8	Ruang/Gedung Lab Bahasa	Tidak memiliki	Baik
9	Ruang/Gedung <i>Workshop</i>	Tidak memiliki	Tidak memiliki
10	Ruang/Gedung Serbaguna	Tidak memiliki	Baik
11	Ruang/Gedung Tempat Ibadah	Baik	Baik
12	Ruang Bimbingan Konseling	Baik	Baik
13	Ruang Praktik (wirausaha)	Tidak memiliki	Tidak memiliki
14	Ruang IT/ICT (multimedia)	Tidak memiliki	Tidak memiliki
15	Ruang UKS/PMR	Baik	Baik
16	Jamban Siswa	Baik	Baik
17	Jamban Guru	Baik	Baik
18	Kantin Sekolah	Baik	Baik
19	Ruang Olahraga	Tidak memiliki	Baik

na; ruang praktik; ruang *IT/ICT*; ruang olahraga; Sementara jenjang SMP rata-rata mereka sudah memiliki 19 sarana kecuali ruang *workshop*; ruang praktik; ruang *IT/ICT*. Pada umumnya sarana tersebut dalam keadaan baik.

Dari ke-19 standar untuk jenjang SMA tidak memiliki ruang untuk *workshop* dan praktik karena mereka memang tidak membutuhkan langsung sarana tersebut. Sementara untuk SMK, pada umumnya telah memiliki kelengkapan semua sarana dan dalam kondisi baik. Menurut

standar umum, usia ekonomis gedung sekolah adalah 20 tahun. Namun, pada umumnya sekolah belum menghitung biaya penyusutan untuk tiap gedung yang digunakan.

Besaran Biaya Investasi Berdasarkan Jenis dan Jenjang Sekolah

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka biaya satuan (*unit cost*) siswa terhadap biaya investasi berdasarkan jenis dan jenjang sekolah adalah SD sebesar Rp 2.135.000,00, SMP sebesar Rp 3.150.

Tabel 4. Kondisi Sarana Sekolah Menurut Standar (SNP)

No	Ketersediaan Sarana	SMA	SMK
1	Ruang Kelas	Baik	Baik
2	Ruang Kepala Sekolah	Baik	Baik
3	Ruang Wakil Kepala Sekolah	Baik	Baik
4	Ruang Guru	Baik	Baik
5	Ruang/Gedung Perpustakaan	Baik	Baik
6	Ruang/Gedung Lab Ipa	Baik	Baik
7	Ruang/Gedung Lab Komputer	Baik	Baik
8	Ruang/Gedung Lab Bahasa	Baik	Baik
9	Ruang/Gedung <i>Workshop</i>	Tidak memiliki	Baik
10	Ruang/Gedung Serbaguna	Baik	Baik
11	Ruang/Gedung Tempat Ibadah	Baik	Baik
12	Ruang Bimbingan Konseling	Baik	Baik
13	Ruang Praktik (wirausaha)	Tidak memiliki	Baik
14	Ruang IT/ICT (multimedia)	Baik	Baik
15	Ruang UKS/PMR	Baik	Baik
16	Jamban Siswa	Baik	Baik
17	Jamban Guru	Baik	Baik
18	Kantin Sekolah	Baik	Baik
19	Ruang Olahraga	Baik	Baik

000,00, SMA sebesar Rp 4.665.000,00, SMK sebesar Rp 6.758.000,00. Selanjut-

nya, rincian satuan biaya tersebut dapat disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Biaya Satuan Siswa Per Jenjang Sekolah

No	Kelompok Jenjang	Biaya Satuan Siswa
1	SD	Rp 2.135.000,00
2	SMP	Rp 3.150.000,00
3	SMA	Rp 4.665.000,00
4	SMK	Rp 6.758.000,00

Besaran Biaya Personal Siswa Selama Setahun Menurut Jenjang Sekolah di Kota Bandung

Biaya yang dikeluarkan siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah mencakup: buku dan alat tulis sekolah, perlengkapan sekolah, transportasi, kesehatan, karyawisata, dan uang saku. Hasil penelitian tentang besaran biaya personal siswa dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 6, terdapat selisih biaya yang dikeluarkan orang tua per tahun untuk siswa SD (Rp 9.329.300,00) dan SMP (Rp 9.911.000,00). Perbedaan lebih besar pada uang saku SMP sebesar 30,34% dan sisanya hampir sama dan proporsional untuk tiap komponen.

Berdasarkan Tabel 7, biaya personal siswa SMA (Rp 18.613.800,00) lebih besar dibandingkan dengan SMK (Rp

Tabel 6. Biaya Personal Siswa SD dan SMP

No	Jenis Biaya	SD		SMP	
		Besaran	%	Besaran	%
1	Buku ATS	1.211.000	12,98	1.169.800	11,80
2	Perlengkapan Sekolah	1.466.700	15,72	1.395.900	14,08
3	Transportasi	2.370.300	25,41	2.550.600	25,74
4	Kesehatan	1.578.500	16,92	1.041.000	10,50
5	Karyawisata	744.500	7,98	747.000	7,54
6	Uang Saku	1.958.300	20,99	3.006.700	30,34
	Total	9.329.300	100	9.911.111	100

Tabel 7. Biaya Personal SMA dan SMK

No	Jenis Biaya	SMA		SMK	
		Besaran	%	Besaran	%
1	Buku ATS	1.143.900	6,15	1.491.700	8,73
2	Perlengkapan Sekolah	1.348.000	7,24	1.246.200	7,30
3	Transportasi	3.297.650	17,72	3.127.000	18,31
4	Kesehatan	1.366.600	7,34	1.322.800	7,74
5	Karyawisata	2.554.650	13,72	1.290.500	7,56
6	Uang Saku	5.361.000	28,80	5.562.800	32,57
7	Iuran Bulanan Sekolah	3.541.750	19,03	3.040.000	17,80
	Total	18.613.800	100	17.081.000	100

17.081.000,00) per tahunnya. Perbedaan terdapat pada iuran bulanan dan karyawisata. Untuk SMA sebesar 19,03% dan 13,72%, sementara komponen lainnya relatif sama dan proporsional untuk tiap komponen.

Dana dari pemerintah mencakup biaya operasional nonpersonalia dan biaya investasi. Dana masyarakat merupakan dana dari orang tua dalam satu tahun menurut jenis dan jenjang sekolah. Perbandingan biaya yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Biaya Investasi Pemerintah dan Masyarakat

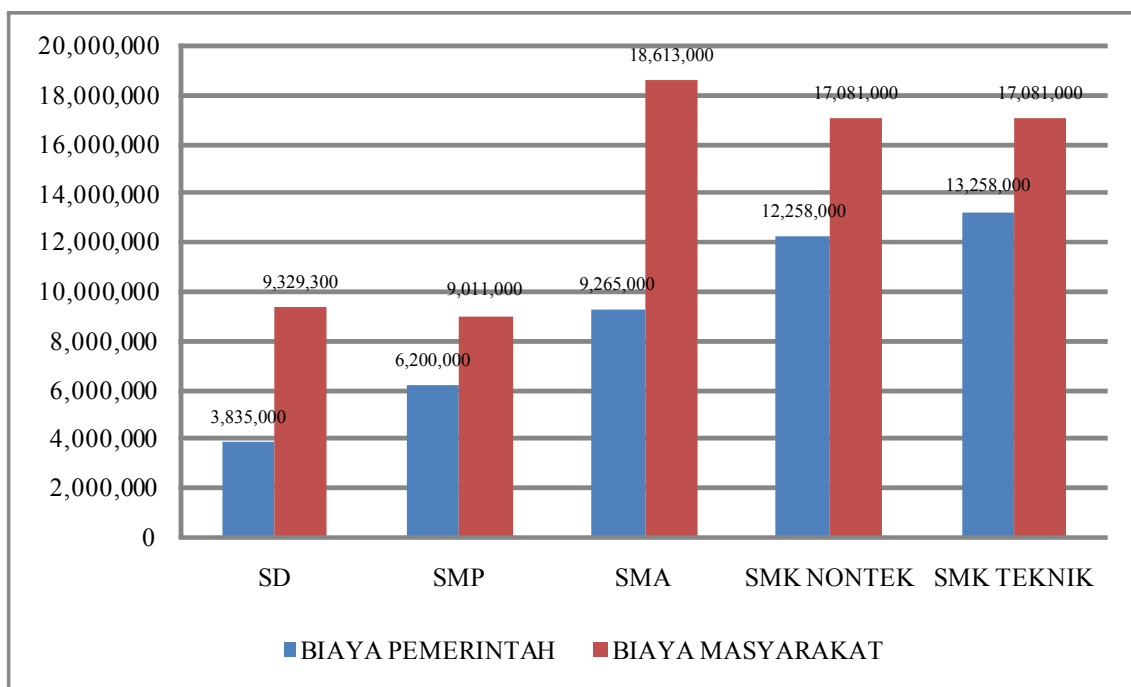
No	Jenjang	Dana Pemerintah		Dana Masyarakat	
		Besaran	Persentase	Besaran	Persentase
1	SD	3.835.000	29,13	9.329.300	70,87
2	SMP	6.200.000	40,76	9.011.000	59,24
3	SMA	9.265.000	33,23	18.613.000	66,77
4	SMK NONTEKNIK	12.078.000	41,78	17.081.000	58,22
5	SMK TEKNIK	13.258.000	43,70	17.081.000	56,30

Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa perbandingan dana peme-

rintah dan masyarakat untuk jenjang SD 29,13% dan 70,87%, jenjang SMP 40,76%

dan 59,24%, untuk jenjang SMA 33,23% dan 66,77%; SMK Nonteknik 41,78% dan 58,22%, dan SMK Teknik 43,70% dan 56,30%. Secara keseluruhan peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan anak

melebihi separuh dari total biaya pendidikan. Lebih jelasnya perbandingan biaya investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta berdasarkan jenjang sekolah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Biaya Investasi Pemerintah dan Masyarakat

Pada gambar 1 tersebut dapat terdeskripsikan bahwa kesenjangan yang cukup signifikan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan orang tua atau masyarakat. Untuk sekolah negeri, pemerintah memang sudah menanggung biaya operasional personalia, biaya operasional nonpersonalia dengan adanya BOS dan juga biaya investasi untuk gedung dan sarana lainnya. Namun, banyak orang tua yang tidak mampu untuk membiayai ongkos, uang saku, dan kebutuhan lain yang harus rutin mereka sediakan setiap hari. Akibatnya, hal ini menjadi kendala untuk meningkatkan perolehan APK/APM di setiap jenjang sekolah apalagi dengan adanya kebijakan pendidikan menengah

universal (PMU) sebagai model wajib belajar hingga 12 tahun.

Untuk pemenuhan biaya investasi yang berkelanjutan, tampaknya banyak fasilitas sekolah baik yang utama dan penunjang yang secara terencana dan terprogram dilakukan rehabilitasi atau pembangunan baru. Contohnya, dengan menghitung umur ekonomis sekolah sesuai standar nasional, yaitu 20 tahun. Namun, dalam pelaksanaan standar tersebut pemerintah mengalami kesulitan. Karena pada umumnya belum dihitung penyusutan (depreiasi) dari masing-masing gedung atau sarana dan prasarana lainnya. Kalau penyusutan ini dihitung maka pemerintah dapat membuat proyeksi secara berkala un-

tuk pembangunan gedung dan sarana sekolah lainnya.

Selanjutnya, untuk melaksanakan penelitian biaya yang akurat maka menghadapi masalah yang cukup rumit dan pelik. Sebab, dalam melakukan perhitungan biaya satuan di tingkat mikro biasanya menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut mencakup kendala politik, teknis, dan kultural. Sekolah dalam mengisi instrumen terjebak oleh kebijakan-kebijakan yang kaku dan sedikit membelenggu kreativitas sekolah dalam penggalian sumber dana. Kemampuan pengelola sekolah, khususnya pimpinan sekolah dalam mengelola sumber daya keuangan sekolah dan akuntabilitasnya, dan ketergantungan sekolah dalam mengeksplorasi sumber-sumber keuangan sekolah yang lebih terbiasa oleh kebiasaan dan *mind set* pengelola yang kurang baik. Selain itu, pihak sekolah dalam menentukan biaya yang diharapkan terjebak oleh keinginan (*desire*), bukan berdasarkan kebutuhan (*need*) yang memang realistis dibutuhkan sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya *capacity building* baik bagi pimpinan dan *supporting staff* sekolah dalam pembiayaan dan manajemen keuangan sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pada umumnya setiap SD dan SMP (sampel) memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung proses belajar-mengajar (PBM) di masing-masing sekolah dan dipandang masih baik, tetapi belum terstandarisasi dengan baik. Kedua, pada umumnya setiap SMA dan SMK memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung

PBM di sekolah dan dipandang masih baik meskipun harus dilakukan rehabilitasi berkala dan berkelanjutan agar optimal, tetapi belum terstandarisasi dengan baik. Ketiga, pada umumnya luas lahan untuk tiap jenjang sekolah sudah memadai dan dipandang melebihi dari luas SNP. Keempat, siswa di tiap jenjang sekolah memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dibanding dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Kelima, siswa atau orang tua di tiap jenjang pendidikan menanggung biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi atau biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keenam, tidak ada alokasi depresiasi untuk infrastruktur pendidikan, sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam merencanakan rehabilitasi atau pembangunan kembali gedung sekolah. Ketujuh, tidak ada data akurat tentang kebutuhan kelas (rombel) dengan standar pendidikan yang telah ditentukan.

Terkait simpulan di atas maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Pertama, sekolah menetapkan jumlah rombongan belajar yang konsisten sesuai dengan standar nasional pendidikan, SD 15-28 siswa, SMP 15-32 siswa dan SMA/ SMK 15-32 siswa. Kedua, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah perlu dianggarkan oleh sekolah agar sekolah memenuhi minimal umur ekonomis 20 tahun. Ketiga, pemerintah perlu menghitung biaya penyusutan (depresiasi) untuk setiap gedung sekolah sehingga membantu perencanaan pembangunan kembali atau rehabilitasi bila diperlukan. Keempat, pemerintah perlu menetapkan standar biaya untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah, yang ada baru standar kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. Kelima,

perlu *cost sharing* antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota/ Kabupaten dalam pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- BSNP. 2006. *Naskah akademik Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta.
- Chaube, S.P & Chaube A.1993. *Comparative Education*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT Ltd.
- Coombs & Hallak.1972. *Managing Educational Cost*. London: Oxford University Press.
- Fattah, Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fraenkel, J.R & Wallen, N.E. 1983. *How to Design and Evaluate Research in Education* (second Ed). Singapore: McGraw-Hill Inc.
- Isaac, Stephen. 1980. *Handbook in Research and Evaluation*. Sandiego: Edits Publisher,.
- Levin, M. Henry & Schultze, G. Hans. 1983. *Financing Recurrent Education, Strategies for Increasing Employment, Job Opportunities and Productivity*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Mingat & Tan. 1988. *Analytical Tools for Sector Works In Education. A World Bank Publication*. Baltimore and London: John Hopkins University Press..
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 dan 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Pendanaan Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah.
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Biaya Operasional Nonpersonalia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: BP Restindo Mediatama. Jakarta.